



## **GUBERNUR BENGKULU**

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Bengkulu

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 000.7/1982/BAPPERIDA/2025

### **TENTANG**

### **KALENDER, JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA TAHUN 2026**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka mewujudkan keseragaman tahapan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dapat selesai tepat waktu, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perihal sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
2. Dokumen perencanaan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah:
  - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, terdiri dari RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026;

- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD, terdiri dari RENJA PD Tahun 2027 dan Perubahan RENJA PD Tahun 2026.
3. Rencana pembangunan daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terintegrasi, lintas sektor, menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan, berorientasi pada *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang terukur dan akuntabel;
4. Penyusunan RKPD dan RENJA PD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada :
  - a. Arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Program Prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN;
  - b. Program Strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta berpedoman pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
  - c. Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perangkat daerah;
  - d. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu bertugas sebagai koordinator penyusunan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026;
6. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu bertugas menyusun RENJA PD Tahun 2027 dan Perubahan RENJA PD Tahun 2026;
7. Penyusunan dokumen RKPD dan RENJA PD dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan kegiatan sebagaimana Lampiran I Surat Edaran ini serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027;

8. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran ini disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Aplikasi SIPD tersebut dapat diakses melalui tautan sebagai berikut <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>;
9. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran ini, dilakukan dengan berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.
10. Informasi tata cara dan tahapan penyusunan RKPD telah disediakan dalam bentuk aplikasi android yang memuat alur kerja dan panduan teknis penyusunan. Aplikasi dapat diakses melalui tautan berikut <https://bit.ly/AplikasiJATARA>;
11. Menghimbau seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lampiran I Surat Edaran Gubernur Bengkulu

Nomor : 000.7/1982/BAPPERIDA/2025

Tanggal : 16 Desember 2025

JADWAL DAN TAHAPAN  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027  
SERTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |                                                                                                  |                                                                                                                                                       | Substansi/Keterangan                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana | Dasar/Acuan                     | Tahun 2025 | Tahun 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| I. PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2027                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1.                                                                                             | Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2027                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | a.                                                                                               | Pembentukan Tim Penyusun RKPD, Orientasi RKPD, Penyusunan Agenda Tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD | Untuk menyusun personalia yang bertugas menyusun RKPD Tahun 2027;                                                                                                                                                           | Bappeda   | Pasal 73 Permendagri No.86/2017 | m1 - m4    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2.                                                                                             | Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 serta Rancangan Awal dan Rancangan Renja PD Tahun 2027 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | a.                                                                                               | Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027                                                                                                             | Berpedoman kepada RPJMD, RKP, Program Prioritas;                                                                                                                                                                            | Bappeda   | Pasal 74 Permendagri No.86/2017 | m1 - m4    |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | b.                                                                                               | Rapat bersama Bappeda Kabupaten/Kota untuk penjadwalan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                      | Membahas jadwal Musrenbang Kabupaten/Kota;                                                                                                                                                                                  | Bappeda   | -                               | m1         |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | c.                                                                                               | Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2027                                                                                                    | Membahas rancangan awal RKPD dengan stakeholder terkait untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan RKPD. Hasil konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara. Bappeda kemudian melakukan penyempurnaan Ranwal RKPD; | Bappeda   | Pasal 80 Permendagri No.86/2017 | m3         |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | d.                                                                                               | Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 kepada Gubernur                                                                                            | Disampaikan untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja PD. Pengajuan dilampirkan konsep nota dinas edaran Gubernur dan dokumen ranwal RKPD;                                              | Bappeda   | Pasal 82 Permendagri No.86/2017 | m4         |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |    |                                                                                                                        | Substansi/Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelaksana | Dasar/Acuan                                                                                                                                                              | Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tahun 2026                                     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                          | Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jan                                            | Feb | Mar | Apr     | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|                                                                                                | e. | Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala PD | 1. Surat Edaran memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan batas waktu penyampaian Ranwal Renja PD untuk diverifikasi;<br><br>2. Surat Edaran memuat lampiran : a) sasaran dan prioritas pembangunan daerah, b) program dan kegiatan perangkat daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif; | Bappeda   | Pasal 83 Permendagri No.86/2017                                                                                                                                          | m4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | m2  |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                          | indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;<br><br>2.Rancangan Awal Renja PD yang telah disempurnakan, berubah menjadi Rancangan Renja PD; | Permendagri No.86/2017                         |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | f. |                                                                                                                        | Verifikasi Rancangan Renja PD dengan Ranwal RKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Verifikasi untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rancangan Renja PD diserahkan; | Bappeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pasal 134 dan Pasal 135 Permendagri No.86/2017 |     |     | m2 - m4 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2027                                                        |    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | a. | Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2027                                                                                   | Merupakan proses penyempurnan dari ranwal RKPD berdasarkan ranwal Renja PD hasil verifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional;                                                                                                                                                                                  | Bappeda   | Pasal 85 Permendagri No.86/2017                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | m2  |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |    |                                                                                                                   | Substansi/Keterangan                                                                                                                                                                                                                              | Pelaksana | Dasar/Acuan                      | Tahun 2025 | Tahun 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                  | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|                                                                                                | b. | Pengajuan Rancangan RKPD kepada Gubernur                                                                          | 1. Untuk memperoleh persetujuan terhadap Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD;<br><br>2. Dilampirkan Konsep Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang penyalarsan prioritas pembangunan dan jadwal Musrenbang RKPD Provinsi; | Bappeda   | Pasal 86 Permendagri No.86/2017  |            |            | m3  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | c. | Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi kepada Bupati/Walikota                          | 1. Memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota lingkup provinsi;<br><br>2. Dilampirkan jadwal Musrenbang RKPD Provinsi dan dokumen rancangan RKPD;                               | Bappeda   | Pasal 87 Permendagri No.86/2017  |            |            | m4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4.                                                                                             |    | Musrenbang RKPD Tahun 2027                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                  |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | a. | Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu/Kortekrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2027                 | 1. Melakukan penyalarsan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota;<br><br>2. Menggunakan acuan Rancangan RKPD;               | Bappeda   | Pasal 90 Permendagri No.86/2017  |            |            |     | m1  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | b. | Musrenbang RKPD provinsi Tahun 2027                                                                               | Membahas rancangan RKPD, menerima masukan, saran dan koreksi untuk penyempurnaan Rancangan RKPD. Hasil Musrenbang dituangkan kedalam Berita Acara;                                                                                                | Bappeda   | Pasal 90 Permendagri No.86/2017  |            |            |     | m2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5.                                                                                             |    | Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                  |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | a. | Penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2027 berdasarkan hasil Musrenbang RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 | Dilakukan penyesuaian, perubahan dan penyempurnaan dokumen rancangan RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD untuk menjadi Rancangan Akhir RKPD;                                                                                                   | Bappeda   | Pasal 100 Permendagri No.86/2017 |            |            |     | m3  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | b. | Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh kepala PD       | Dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD;                                                                                                                                     | Bappeda   | Pasal 101 Permendagri No.86/2017 |            |            |     | m3  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | c. | Finalisasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027                                                                        | Melakukan finalisasi dokumen;                                                                                                                                                                                                                     | Bappeda   | Pasal 101 Permendagri No.86/2017 |            |            |     | m3  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | d. | Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2027                                                   | Berdasarkan Rancangan RKPD yang telah dibahas bersama dengan kepala PD;                                                                                                                                                                           | Bappeda   | Pasal 102 Permendagri No.86/2017 |            |            |     | m4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |    |                                                                                                                            | Substansi/Keterangan                                                                                                                                                                                                                            | Pelaksana | Dasar/Acuan                      | Tahun 2025 | Tahun 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                |    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                  | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|                                                                                                | e. | Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 berdasarkan hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan Review Inspektorat | Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Surat Mennteri Dalam Negeri tentang hasil fasilitasi dan berdasarkan review inspektorat.                                                                       | Bappeda   | Pasal 102 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     | m4  |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | f. | Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2027 kepada Gubernur                                           | Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya diajukan persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi Rancangan Pergub RKPD; | Bappeda   | Pasal 103 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     | m1  |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | g. | Penetapan Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2027                                                                       | Setelah RKP ditetapkan;                                                                                                                                                                                                                         | Bappeda   | Pasal 104 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     | m2  |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | h. | Penyampaian Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2027 kepada Menteri Dalam Negeri                                         | Disampaikan melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pergub ditetapkan;                                                                                                         | Bappeda   | Pasal 107 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     | m3  |     |     |     |     |     |     |     |
| 6.                                                                                             |    | Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                  |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7.                                                                                             |    | Penetapan Renja PD                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                  |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | a. | Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027                                                                             | Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2027;                                                                                          | Bappeda   | Pasal 141 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     | m4  |     |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | b. | Penetapan Renja PD Tahun 2027 hasil verifikasi dengan Keputusan Gubernur                                                   | Rancangan Renja hasil verifikasi di sampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan;                                                                                | Bappeda   | Pasal 142 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     | m4  |     |     |     |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |                                                             |                                                                                                                        | Substansi/Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana     | Dasar/Acuan                                               | Tahun 2025 | Tahun 2026 |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun     | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| II.                                                                                            | PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2026 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |            |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | 1.                                                          | Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Rencana Kerja PD Tahun 2026                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                           |            |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | a.                                                          | Proses penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026                                                                  | 1. Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada: (a) Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan (b) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;<br><br>2. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup: (a) analisis ekonomi dan keuangan Daerah; (b) evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; (c) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; (d) perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan (e) perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif;<br><br>3. Pembahasan Neraca Keuangan Daerah dengan TAPD dan BPKD; | Bappeda       | Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     | m1 - m4 |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | b.                                                          | Penyampaian pokok pokok pikiran DPRD                                                                                   | 1. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;<br><br>2. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran dapat disampaikan dalam aplikasi SIPD dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah;                                                                                                                               | DPRD, Bappeda | Pasal 348 Permendagri No.86/2017                          |            |            |     |     |     |     | m1 - m4 |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | c.                                                          | Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan | Rancangan Perubahan RKPD tahun 2026 disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dan persiapan untuk penyusunan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bappeda       | Pasal 351 Permendagri No.86/2017                          |            |            |     |     |     |     | m4      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | d.                                                          | Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2026                                     | Edaran Gubernur tentang Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2026 disampaikan kepada Kepala PD disertai dengan lampiran berupa Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bappeda       | Pasal 352 Permendagri No.86/2017                          |            |            |     |     |     |     |         | m1  |     |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |    |                                                                                                               | Substansi/Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pelaksana | Dasar/Acuan                      | Tahun 2025 | Tahun 2026 |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                |    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                  | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun     | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|                                                                                                | e. | Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2026                                                            | Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026;                                                                                                              | Bappeda   | Pasal 352 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     | m1 - m2 |     |     |     |     |     |     |
| 2.                                                                                             |    | Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD dan Rencana Kerja PD Tahun 2026                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                  |            |            |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | a. | Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026                                                                    | 1. Rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD;<br><br>2. Rancangan Akhir RKPD disusun dengan sistematika: (a) analisis ekonomi dan keuangan Daerah;(b) evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; (c)penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; (d) perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dankebijakan keuangan Daerah; dan (e) perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif; | Bappeda   | Pasal 353 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     | m2      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | b. | Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2026                                     | Disusun berpedoman dan dilampirkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bappeda   | Pasal 354 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     | m2      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | c. | Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2026 berdasarkan hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri | Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Surat Mennteri Dalam Negeri tentang hasil fasilitasi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bappeda   | Pasal 354 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     | m2      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | d. | Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 kepada Gubernur                    | Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD;                                                                                                                                                                                                                                                             | Bappeda   | Pasal 354 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     | m3      |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                                | e. | Penetapan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2026                                                | Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bappeda   | Pasal 354 Permendagri No.86/2017 |            |            |     |     |     |     | m3      |     |     |     |     |     |     |

| Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 |  |    |                                                                      | Substansi/Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pelaksana | Dasar/Acuan                       | Tahun 2025 | Tahun 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|                                                                                                |  |    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                   | Des        | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |  |  |
|                                                                                                |  | f. | Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah | 1. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;<br><br>2. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD;                                                                                                         | Bappeda   | Pasal 365 Permendagri No.86/2017  |            |            |     |     |     |     |     | m4  |     | m2  |     |     |     |  |  |
|                                                                                                |  | g. | Penetapan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026                      | 1. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;<br><br>2. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD ditetapkan; | Bappeda   | Pasal 367 Permendagri No. 86/2017 |            |            |     |     |     |     |     |     | m3  |     |     |     |     |  |  |



GUBERNUR BENGKULU  
HELMI HASAN